



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor. 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1746/DJU.1/PW1.4/XI/2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Perintah

Jakarta, 10 November 2025

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran
(sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor 15616/SEK/PW1.4/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025)
di -
Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 15616/SEK/PW1.4/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025 perihal Perintah, serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2.b/LHP/XIV/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 tentang Penganggaran dan Pembebanan Belanja Barang Tidak Sesuai Klasifikasi Belanja Sebesar Rp1,78 Miliar, bersama ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memerintahkan kepada Para Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud untuk menginstruksikan kepada:

- 1) Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar untuk mematuhi klasifikasi dan alokasi anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan pada saat pelaksanaan dan realisasi belanja sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL); dan
- 2) Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan/Kepala Bagian Urusan Dalam/Kepala Bagian Umum dan Keuangan/Kepala Subbagian Umum dan Keuangan lebih cermat dalam mengidentifikasi dan mencatat belanja yang menghasilkan Aset Tetap. Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Sekretaris Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum



Kurnia Arry Soelaksono

Tembusan :

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung;
3. Yth. Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
5. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
6. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung;
7. Yth. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
8. Yth. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
9. Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Satuan Kerja Terkait;
10. Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada Satuan Kerja Terkait;



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 15616/SEK/PW1.4/X/2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Perintah

Jakarta, 16 Oktober 2025

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran
(Daftar Nama Satuan Kerja Terlampir)

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.b/LHP/XIV/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 tentang Penganggaran dan Pembebanan Belanja Barang Tidak Sesuai Klasifikasi Belanja Sebesar Rp1,78 Miliar, dengan ini memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja terkait untuk menginstruksikan kepada:

- a. Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar untuk mematuhi klasifikasi dan alokasi anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan pada saat pelaksanaan dan realisasi belanja sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL); dan
- b. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan/Kepala Bagian Urusan Dalam/Kepala Bagian Umum dan Keuangan/Kepala Subbagian Umum dan Keuangan lebih cermat dalam mengidentifikasi dan mencatat belanja yang menghasilkan Aset Tetap.

Adapun tindak lanjut dikirimkan melalui surat elektronik ke informasi.bawas@mahkamahagung.go.id dan tgrbirkeu@gmail.com sebelum tanggal 14 November 2025.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

Tembusan:

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

2. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung;
3. Yth. Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
5. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
6. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung;
7. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung;
8. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung;
9. Yth. Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung;
10. Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Satuan Kerja Terkait;
11. Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada Satuan Kerja Terkait;
12. Yth. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung; dan
13. Yth. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

LAMPIRAN

Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Nomor : 15616/SEK/PW1.4/X/2025
Tanggal : 16 Oktober 2025

DAFTAR NAMA SATUAN KERJA

No.	Nama Satuan Kerja
1	Badan Urusan Administrasi
2	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
3	Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan
4	Pengadilan Tinggi Ambon
5	Pengadilan Tinggi Bandung
6	Pengadilan Tinggi Banjarmasin
7	Pengadilan Tinggi Denpasar
8	Pengadilan Tinggi Kendari
9	Pengadilan Tinggi Manado
10	Pengadilan Tinggi Medan
11	Pengadilan Tinggi Padang
12	Pengadilan Tinggi Pontianak
13	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
14	Pengadilan Tinggi Agama Jambi
15	Pengadilan Tinggi Agama Kendari
16	Pengadilan Tinggi Agama Mataram
17	Pengadilan Negeri Ambon
18	Pengadilan Negeri Atambua
19	Pengadilan Negeri Bangil
20	Pengadilan Negeri Bangkinang
21	Pengadilan Negeri Banjar
22	Pengadilan Negeri Banjarbaru
23	Pengadilan Negeri Belopa

No.	Nama Satuan Kerja
24	Pengadilan Negeri Binjai
25	Pengadilan Negeri Bobong
26	Pengadilan Negeri Bulukumba
27	Pengadilan Negeri Cilacap
28	Pengadilan Negeri Curup
29	Pengadilan Negeri Depok
30	Pengadilan Negeri Dompu
31	Pengadilan Negeri Dumai
32	Pengadilan Negeri Garut
33	Pengadilan Negeri Gresik
34	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
35	Pengadilan Negeri Jantoi
36	Pengadilan Negeri Kabanjahe
37	Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun
38	Pengadilan Negeri Kabupaten Malang, Jawa Timur
39	Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang Di Ungaran
40	Pengadilan Negeri Kandangan
41	Pengadilan Negeri Kediri
42	Pengadilan Negeri Kendari
43	Pengadilan Negeri Kolaka
44	Pengadilan Negeri Kotamubago
45	Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
46	Pengadilan Negeri Limboto
47	Pengadilan Negeri Madiun
48	Pengadilan Negeri Magelang
49	Pengadilan Negeri Majene
50	Pengadilan Negeri Malinau
51	Pengadilan Negeri Marabahan

No.	Nama Satuan Kerja
52	Pengadilan Negeri Maros
53	Pengadilan Negeri Martapura
54	Pengadilan Negeri Mempawah
55	Pengadilan Negeri Metro
56	Pengadilan Negeri Muara Enim
57	Pengadilan Negeri Padang Sidempuan
58	Pengadilan Negeri Pare-Pare
59	Pengadilan Negeri Pati
60	Pengadilan Negeri Pekanbaru
61	Pengadilan Negeri Pematang
62	Pengadilan Negeri Pinrang
63	Pengadilan Negeri Polewali
64	Pengadilan Negeri Probolinggo
65	Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri
66	Pengadilan Negeri Ruteng
67	Pengadilan Negeri Sengkang
68	Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang
69	Pengadilan Negeri Singkawang
70	Pengadilan Negeri So'E
71	Pengadilan Negeri Sukabumi
72	Pengadilan Negeri Sukoharjo
73	Pengadilan Negeri Sungguminasa
74	Pengadilan Negeri Takengon
75	Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
76	Pengadilan Negeri Tanjung Pati
77	Pengadilan Negeri Tanjung Pinang
78	Pengadilan Negeri Una Aha
79	Pengadilan Negeri Waingapu

No.	Nama Satuan Kerja
80	Pengadilan Negeri Wates
81	Pengadilan Negeri Yogyakarta
82	Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue
83	Pengadilan Agama Amuntai
84	Pengadilan Agama Banjarbaru
85	Pengadilan Agama Bantaeng
86	Pengadilan Agama Bantul
87	Pengadilan Agama Bau-Bau
88	Pengadilan Agama Bintuhan
89	Pengadilan Agama Depok
90	Pengadilan Agama Jombang
91	Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
92	Pengadilan Agama Kangean
93	Pengadilan Agama Karawang
94	Pengadilan Agama Ketapang
95	Pengadilan Agama Kwandang
96	Pengadilan Agama Lamongan
97	Pengadilan Agama Malang
98	Pengadilan Agama Manna
99	Pengadilan Agama Maumere
100	Pengadilan Agama Negara
101	Pengadilan Agama Ngawi
102	Pengadilan Agama Painan
103	Pengadilan Agama Palangkaraya
104	Pengadilan Agama Palembang
105	Pengadilan Agama Pangkal Pinang
106	Pengadilan Agama Paniai
107	Pengadilan Agama Polewali

No.	Nama Satuan Kerja
108	Pengadilan Agama Ponorogo
109	Pengadilan Agama Probolinggo
110	Pengadilan Agama Rantau Prapat
111	Pengadilan Agama Rumbia
112	Pengadilan Agama Selayar
113	Pengadilan Agama Subang
114	Pengadilan Agama Tembilahan
115	Pengadilan Agama Tual
116	Pengadilan Agama Tuban
117	Pengadilan Agama Unaaha
118	Pengadilan Agama Wonosari
119	Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo
120	Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
121	Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
122	Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya
123	Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

B.6.a&b



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN